



UNIVERSITAS
MH THAMRIN

UNIVERSITAS M.H.THAMRIN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

PRODI S2 KESEHATAN MASYARAKAT

Kode Dokumen
No.008/S2Kesmas.FKes/
UMHT/I/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Manajemen Kebijakan Kesehatan	KN 203	Kesehatan	T: 2 P: 0	2	07 Januari 2024
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka PRODI
	DR.dr.Rr.Brian Sri Prahastuti, M.P.H (Lektor)				Dr. Ajeng Tias Endarti, SKM, M.Comm Health (Lektor Kepala) 
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9)			
	CPL2	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU 3)			
	CPL3	Menunjukkan pemahaman mengenai pengertian, konsep dan teori ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan masyarakat (P1)			
	CPL4	Mampu mengaplikasikan ilmu manajemen dan kebijakan dalam kesehatan masyarakat (KK1)			

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Menerima tujuan pembelajaran manajemen kebijakan kesehatan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sehari-hari (CPL1)	
CPMK-2	Mengaplikasikan keterampilan manajerial dan argumentasi manajemen dan kebijakan terhadap masalah kesehatan masyarakat yang menjadi isu global dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (CPL2)	
CPMK-3	Menunjukkan pemahaman mengenai konsep dan teori manajemen serta kemampuan menjelaskan model kebijakan kesehatan (CPL3)	
CPMK-4	Mampu mengorganisasikan diskusi publik yang melibatkan stakeholder untuk mengevaluasi kebijakan serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk debottlenecking isu global yang menjadi prioritas masalah kesehatan / akselerasi pencapaian target(CPL4)	
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK 1.1	Mahasiswa menyepakati kontrak belajar manajemen kebijakan kesehatan (A2)	
Sub-CPMK 2.1	Mahasiswa mampu mengaktualisasikan prinsip umum manajemen, dasar ideologis, legal dan etis kebijakan kesehatan (C6)	
Sub-CPMK 2.2	Mahasiswa mampu mencontohkan prinsip berfikir sistem dalam upaya memahami kesehatan (C2)	
Sub-CPMK 2.3	Mahasiswa mampu menggambarkan kerangka kebijakan <i>the six building block health system dan metamorphosis sistem kesehatan nasional</i> (C1)	
Sub-CPMK 2.4	Mahasiswa mampu membandingkan sistem kesehatan nasional dengan kerangka kerja sistem kesehatan WHO (C2)	

Sub-CPMK 3.1	Mahasiswa mampu merinci dimensi kekuatan dalam proses penyusunan kebijakan (C4)
Sub-CPMK 3.2	Mahasiswa mampu mencontohkan aplikasi teori pembagian kekuasaan dan teori pengambilan keputusan (C2)
Sub-CPMK 3.3	Mahasiswa mampu menjelaskan urgensi melakukan reformasi sektor kesehatan (C2)
Sub-CPMK 3.4	Mahasiswa mampu menelaah perbandingan kebijakan reformis di berbagai negara (C4)
Sub-CPMK 3.5	Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan tombol dalam perubahan kebijakan kesehatan (C2)
Sub-CPMK 3.6	Mahasiswa mampu mencontohkan kebijakan desentralisasi dan <i>Good Governance</i> (C2)
Sub-CPMK 3.7	Mahasiswa mampu menggambarkan pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap manajemen kesehatan (C1)
Sub-CPMK 3.8	Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan top-down dan bottom-up dalam proses kebijakan (C2)
Sub-CPMK 4.1	Mahasiswa mampu menguraikan aplikasi teori ketergantungan dan konflik dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan (C2)
Sub-CPMK 4.2	Mahasiswa mampu merinci faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan (C4)
Sub-CPMK 4.3	Mahasiswa mampu menguraikan perbedaan pendekatan retrospektif dan prospektif untuk menganalisis kebijakan (C4)
Sub-CPMK 4.4	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan data dan informasi untuk analisis kebijakan (C3)

Sub-CPMK 4.5	Mahasiswa mampu membuat bagan pemetaan aktor dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan (C4)
Sub-CPMK 4.6	Mahasiswa mampu menciptakan formulasi rekomendasi kebijakan publik untuk <i>debottlenecking</i> dan akselerasi (C6)
Sub-CPMK 4.7	Mahasiswa mampu memfasilitasi para pihak dalam diskusi kebijakan yang meliputi kegiatan seminar publik dan dialog pakar (C6)

Koreksi CPMK terhadap Sub-CPMK

	SCP MK 1.1	SCP MK 2.1	SCP MK 2.2	SCP MK 2.3	SCP MK 2.4	SCP MK 3.1	SCP MK 3.2	SCP MK 3.3	SCP MK 3.4	SCP MK 3.5	SCP MK 3.6	SCP MK 3.7	SCP MK 3.8	SCP MK 4.1	SCP MK 4.2	SCP MK 4.3	SCP MK 4.4	SCP MK 4.5	SCP MK 4.6	SCP MK 4.7
CPMK-1	√																			
CPMK-2		√	√	√	√															
CPMK-3						√	√	√	√	√	√	√	√							
CPMK-4														√	√	√	√	√	√	√

**Deskripsi
Singkat MK**

Mata kuliah ini membahas ilmu kebijakan dan manajemen yang diterapkan di sektor kesehatan. Sektor kesehatan membutuhkan berbagai konsep yang mendasari praktek-praktek multidisiplin yang berkaitan dengan proses kebijakan, dan manajemen pelaksanaannya di masyarakat. Ilmu Kebijakan mengembangkan kajian tentang hubungan antara pemerintah dan swasta, distribusi kewenangan dan tanggung jawab antar berbagai level pemerintah, mempelajari hubungan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya, membahas ideologi kebijakan, sampai memperdebatkan makna reformasi kesehatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, teori dan konsep manajemen tidak dapat diabaikan. Manajemen menjadi penentu kunci sukses ataupun gagalnya pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, manajemen sering dibagi menjadi manajemen organisasi dan manajemen program.

Bahan Kajian: Materi pembelajaran	1) Konsep berfikir sistem, pengertian sistem kesehatan dan manajemen kesehatan 2) Dasar ideologis, legal dan etis untuk kebijakan kesehatan 3) Reformasi kebijakan sektor kesehatan 4) Pelaksanaan manajemen dan kelembagaan sektor kesehatan 5) Peta Masalah kebijakan dan manajemen Kesehatan 6) Analisis Kesenjangan Kebijakan Kesehatan	
Pustaka	Utama	1. Blas, E., Sommerfeld, J., & Kurup, A.S. 2011. <i>Social determinants approaches to public health: from concept to practice</i> . Geneva: World Health Organization. 224 pages. ISBN-10: 924156413X. ISBN-13: 978-9241564137 2. Gill, Walt. 1994. <i>Health Policy: An Introduction to Process and Power</i> . 4 th Edition. Bloomsbury Academic. Zed Books. 226 pages. ISBN-10: 1856492648. ISBN-13: 978-1856492645 3. Goldsmith, Seth B. 1981. <i>Health Care Management: A Contemporary Perspective</i> . Rockville, Maryland: An Aspen Publication. ISBN 894433369 4. Kementerian Kesehatan RI. 2024. <i>Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023: Potret Indonesia Sehat</i> . Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 5. Kementerian Kesehatan RI. 2024. <i>Survei Kesehatan Indonesia 2023 Dalam Angka: Data Akurat Kebijakan Tepat</i> . Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 6. Kementerian Kesehatan RI. 2019. <i>Laporan Nasional Riskesdas 2018</i> . Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 7. Kementerian Kesehatan RI, 2013. <i>Riset Kesehatan Dasar 2013</i> . Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 8. Kent, B., Nicholas, M., Manuela, C., Alec, F., Mishal, K., Helen, W. 2024. <i>Making Health Policy</i> . 3 rd Edition. London: McGraw-Hill Education Open University Press. 5 September 2023. 288 pages. ISBN-10: 0335251692. ISBN-13: 9780335251698 9. Levey, S. Loomba, P.N. 1973. <i>Health Care Administration: A Managerial Perspective</i> . Philadelphia: J.B. Lippincott. ISBN 039752059X 10. Nugroho, Riant. 2021. <i>Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik</i> . Jakarta. PT Gramedia. ISBN 978-602-04-0007-5 11. Shortell, S.M., Kaluzny, A.D. 1988. <i>Health Care Management: A text in Organization Theory and Behavior</i> . 2 nd Edition. John Wiley and Sons. ISBN 0471851116 12. World Health organization. 2010. <i>Monitoring the Building Block Health System: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies</i> . Geneva: WHO Press.

Pendukung

13. UU No 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.
14. UU No 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
15. UU No 21 tahun 2023 subsider UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
16. UU No 17 tahun 2023 tentang Omnibus Law Kesehatan
17. UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
18. UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
19. UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
20. UU No 18 tahun 2018 tentang Pangan
21. UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah subsider UU No 23 tahun 2014 tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
22. UU No 35 tahun 2014 perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
23. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
24. UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
25. UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
26. UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
27. UU No 5 tahun 2000 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. PP No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
29. PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
30. PP No 72 tahun 2019 sub PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
31. PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua jo PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
32. PP No 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
33. PP No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
34. PP No 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
35. PP No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

36. PP No 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
37. PP No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
38. PP No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
39. Peraturan Presiden No 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
40. Peraturan Presiden No 55 tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
41. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS
42. Peraturan Presiden No 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
43. Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
44. Peraturan Presiden No 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2022 tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah pada tahun 2022-2024.
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
47. Permendes Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024
48. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincial Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual
53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang SIMPUS telah mengubah cara Puskesmas beroperasi dengan mengintegrasikan teknologi informasi dengan layanan kesehatan
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban RS dan kewajiban Pasien
57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Higiene Sanitasi, kolam renang, dan pemandian umum.

	<p>58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan SDM Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga</p> <p>59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas</p> <p>60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek</p> <p>61. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan</p> <p>62. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi</p> <p>63. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor di rumah sakit</p> <p>64. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum</p> <p>65. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek</p> <p>66. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</p> <p>67. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit</p> <p>68. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN</p>
Dosen	DR.dr.Rr.Brian Sri Prahastuti, MPH
Matakuliah Syarat	1. NA

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa;		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkenalan, kotrak belajar, pengantar kebijakan kesehatan dan prinsip umum manajemen (100 menit)	<ol style="list-style-type: none"> Menerima tujuan pembelajaran, substansi/materi kuliah, proses, tugas, sumber, penilaian Merespon positif kesesuaian ilmu sosial perilaku kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi ruang lingkup pekerjaan sehari-hari Mampu mengaktualisasikan prinsip umum manajemen, dasar ideologis, legal dan etis kebijakan kesehatan (C6) 	<p>Kriteria: Ada kesesuaian dalam menjelaskan tujuan pembelajaran kesesuaian ruang lingkup pekerjaan dan tupoksi</p> <p>Bentuk : skoring sikap</p>	<p>TM 1 x (2 x 50 ')</p> <p>CURAH PENDAPAT</p> <p>Sistem kesehatan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan. Kebijakan kesehatan sebagai kebijakan publik dibuktikan dengan adanya program kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan memberikan perlindungan</p>	<p>BM 1 x (2 x 70')</p> <p>TUGAS BACA World Health organization. 2010. <i>Monitoring the Building Block Health System: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies</i>. Geneva: WHO Press.</p>	<p>PERKENALAN: Ekspektasi terhadap mata kuliah ISP Kepentingannya mempelajari ISP siapakah 'KITA' dan apa 'MANUSIA' itu?</p> <p>KOTRAK BELAJAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hari, jam dan lama perkuliahan Tata-tertib Kurikulum dan Pokok Bahasan Tujuan dan Metode Pembelajaran Syarat kehadiran dan penugasan Sistem penilaian dan evaluasi 	5 %

		4. Mampu mencontohkan prinsip berfikir sistem dalam upaya memahami kesehatan (C2)		(jaminan) kesehatan bagi terutama kelompok yang paling membutuhkan (terpinggirkan).		SUB POKOK BAHASAN: 1.1. Teori Sistem 1.2. Berfikir secara Sistem 1.3. Prinsip Umum Manajemen	
2	Kerangka kebijakan dan sistem kesehatan (200 menit)	<p>1. Mampu menggambarkan kerangka kebijakan <i>the six building block health system dan metamorphosis sistem kesehatan nasional (C1)</i></p> <p>2. Mampu membandingkan sistem kesehatan nasional dengan kerangka kerja sistem kesehatan WHO (C2)</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam mencontohkan prinsip berfikir sistem</p> <p>Bentuk: Lembar Penilaian Individu-1</p>	<p>TM 2 x (2 x 50 ')</p> <p>CTJ Adanya kebijakan nasional tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Sehingga kerangka kerja WHO membangun sistem kesehatan menjadi acuan Indonesia dalam menyusun sistem kesehatan nasional</p>	<p>BM 2 x (2 x 70')</p> <p>TUGAS BACA: Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023</p> <p>TUGAS TULIS: Komparasi Komponen Sub-sistem Kesehatan menurut the Six Building Block Health System antara PP No 72 tahun 2012 dan PP No 24 tahun 2024</p>	<p>SUB POKOK BAHASAN: 2.1. Konteks Kebijakan Kesehatan 2.2. <i>The Six Building Block Health System</i> 2.3. Sistem Kesehatan Nasional</p>	15%

4	Penetapan kebijakan dan kekuatan yang mempengaruhi (200 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merinci dimensi kekuatan dalam proses penyusunan kebijakan (C4) 2. Mampu mencontohkan aplikasi teori pembagian kekuasaan dan teori pengambilan keputusan (C2) 	<p>Kriteria: Ketepatan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi penetapan kebijakan</p> <p>Bentuk :</p>	<p>TM 2 x (2 x 50 ')</p> <p>CTJ Perumusan kebijakan dalam kehidupan berdemokrasi melibatkan banyak pihak, terutama kebijakan yang menyangkut pencapaian tujuan publik. Penyusunan kebijakan sangat dipengaruhi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk mengambil keputusan.</p>	<p>BM 2 x (2 x 70')</p> <p>TUGAS BACA: Kementerian Kesehatan RI. 2024. <i>Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023: Potret Indonesia Sehat</i>. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.</p> <p>TUGAS KELOMPOK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana distribusi kasus HIV/AIDS di global dan Indonesia? - Siapa saja aktor yang berkepentingan dengan penyebab masalah dan 	<p>SUB POKOK BAHASAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Dimensi Kekuatan dalam proses penyusunan kebijakan 3.2. Teori Pembagian Kekuasaan 3.3. Teori Pengambilan Keputusan 	15%
---	--	---	---	--	--	--	-----

					solusi kasus HIV/AIDS?		
	Reformasi Sektor Kesehatan (200')	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan urgensi melakukan reformasi sektor kesehatan (C2) 2. Mampu menelaah perbandingan kebijakan reformis di berbagai negara. (C4), 3. Mampu menjelaskan pendekatan tumbol dalam perubahan kebijakan kesehatan (C2) 	<p>Kriteria: Ketepatan dalam membandingkan perbedaan dan persamaan bbrp teori sistem</p> <p>Bentuk : Lembar Penilaian Individu</p>	<p>TM 2 x (2 x 50 ')</p> <p>CURAH PENDAPAT urgensi dan kemendesakan untuk melakukan perubahan kebijakan kesehatan yang menyeluruh dan bersamaan</p>	<p>BM 2x (2x70')</p> <p>TUGAS BACA Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan Jiwa</p> <p>TUGAS KELOMPOK Diskusikan komparasi substansi kesehatan jiwa yang diatur pada UU Kesehatan No 17 tahun 2023 dan UU Kesehatan Jiwa No 18 tahun 2014</p>	<p>SUB POKOK BAHASAN: 4.1. Pendekatan dalam Perubahan Kebijakan 4.2. Agenda Kebijakan Reformasi Kesehatan</p>	10%
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
	Tatakelola Sektor Kesehatan dan Kebijakan Desentralisasi (200 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggambarkan pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap 	<p>Kriteria: Ketepatan dalam menilai kepatuhan</p>	<p>TM 2 x (2 x 50 ')</p> <p>DISKUSI PANEL Bagaimana pengelolaan isu</p>	<p>BM 2x (2x70')</p> <p>TUGAS BACA: Undang Undang No 17 tahun 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5.1. Konsep Governance (Tata Kelola) 5.2. Kebijakan Desentralisasi dan 	15%

		<p>manajemen kesehatan (C1)</p> <p>2. Mampu menjelaskan pendekatan top-down dan bottom-up dalam proses kebijakan (C2)</p>	<p>Pemda thd substansi SPM</p> <p>Bentuk :</p>	<p>kesehatan mental di daerah?</p>	<p>tentang Omnibus Law Kesehatan</p> <p>TUGAS INDIVIDU: Buat studi komparasi reformasi kebijakan kesehatan di berbagai negara</p>	<p>Pembagian Urusan Pusat dan Daerah</p> <p>5.3. Dampak Kebijakan Desentralisasi terhadap tata kelola bidang kesehatan di Indonesia</p>	
	<p>Pelaksanaan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (200 menit)</p>	<p>1. Mampu menguraikan aplikasi teori ketergantungan dan konflik dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan (C2)</p> <p>2. Mampu merinci faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan (C4)</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat</p> <p>Bentuk :</p>	<p>TM 2 x (2 x 50 ')</p> <p>CTJ Menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan (public) kesehatan dilaksanakan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong/penghambat yang berkontribusi pada keberhasilan</p>	<p>BM 2 x (2X70'):</p> <p>TUGAS INDIVIDU Membuat tulisan pendek 300 kata maksimal (feature) 4 W 1 H satu masalah kesehatan global yang juga menjadi masalah kesehatan nasional: - Anemia pada wanita usia subur dan BBLR</p>	<p>SUB POKOK BAHASAN: 6.1. Logika top-down pada pelaksanaan kebijakan 6.2. Teori ketergantungan dan teori konflik 6.3. Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan</p>	<p>15%</p>

					<ul style="list-style-type: none">- Pola Makan dan Diabetes Melitus pada usia produktif- Hipertensi dan Penyakit Jantung Vasoker- Kesehatan mental dan prevalensi bunuh diri pada usia muda- Perilaku Merokok dan keganasan paru-paru- Tuberkulosis dan penyakit infeksi menular lainnya <p>TUGAS KELOMPOK Lakukan skoring prioritas masalah</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					berdasarkan analisis SWOT dari masalah-masalah di atas. Presentasikan dalam bentuk ppt		
	Analisis Kebijakan Kesehatan Global yang Menjadi Isu Nasional (200 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguraikan perbedaan pendekatan retrospektif dan prospektif untuk menganalisis kebijakan (C4) 2. Mampu menerapkan penggunaan data dan informasi untuk analisis kebijakan (C3) 3. Mampu membuat bagan pemetaan aktor dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi 	<p>Kriteria: Ketepatan dalam menganalisis kebijakan nasional yang masih berlaku</p> <p>Bentuk :</p>	<p>TM 2 x (2 x 50 ')</p> <p>PRAKTIKUM (COACHING & DEMO) Situasi kesehatan global dan respon pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut</p>	<p>BM 2 x (2X70'):</p> <p>TUGAS TERTULIS INDIVIDU Membuat transkrip dialog dan analisis kuantitatif angket perspektif implementasi kebijakan atas isu kesehatan tertentu di Indonesia</p> <p>TUGAS KELOMPOK Membuat Laporan Kegiatan Diskusi Publik Kebijakan Kesehatan Global yang menjadi Isu Strategis Nasional</p>	<p>SUB POKOK BAHASAN: 7.1. Pendekatan retrospektif dan prospektif 7.2. Data dan Informasi untuk Analisis Kebijakan 7.3. Analisis Kesenjangan</p>	10%

		kesenjangan kebijakan (C4)					
	Strategi Pengelolaan Perubahan Kebijakan (100 menit)	<p>1. Mampu menciptakan formulasi rekomendasi kebijakan publik untuk <i>debottlenecking</i> dan akselerasi (C6)</p> <p>2. Mampu memfasilitasi para pihak dalam diskusi kebijakan yang meliputi kegiatan seminar publik dan dialog pakar (C6)</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam menyimpulkan alternative kebijakan dan formulasi rekomendasi</p> <p>Bentuk :</p>	<p>TM 1 x (2 x 50')</p> <p>CTJ Penggunaan sosial media untuk mengkomunikasikan perubahan kebijakan</p>	<p>BM 1 x (2X70'):</p> <p>TUGAS INDIVIDU Membuat infografis reformasi perubahan kebijakan berdasarkan hasil dari diskusi publik kebijakan kesehatan global yang menjadi isu startegis di Indonesia.</p>	<p>SUB POKOK BAHASAN: 8.1. Dokumen Rekomendasi Kebijakan 8.2. Advokasi Perubahan Kebijakan</p>	5%
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstruktur, BM=belajar mandiri